

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Karakteristik pemerintah daerah meliputi: ukuran daerah/*size*, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), status daerah, ukuran legislatif, umur pemerintah daerah/*age*, dan *intergovernmental revenue*/jumlah dana perimbangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD tahun 2010-2011. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan wajib dalam LKPD yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Populasi penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini 45 kabupaten/kota di Indonesia yang diambil dengan menggunakan metode *purposive-sampling*. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ukuran daerah/*size*, jumlah SKPD, status daerah, ukuran legislatif, umur pemerintah daerah/*age*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD. Hasil pengujian secara parsial jumlah SKPD, ukuran legislatif, dan umur pemerintah daerah berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran daerah/*size*, status daerah, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD.

Kata Kunci: Pengungkapan Wajib, Ukuran Daerah, Jumlah SKPD, Status Daerah, Ukuran Legislatif, Umur, dan *Intergovernmental Revenue*.